

Implementasi Kebijakan Protokol Kesehatan Pada Masyarakat Kabupaten Jombang di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2021

Nieke Rudyanty Winanda ¹, Muhammad Nur Hidayat ²

^{1), 2)} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Darul Ulum, Jalan Gus Dur no. 29A Jombang,

(email : nieke.rudyanty@gmail.com)

Abstrak

Pandemi global Covid-19 telah mengubah segala aspek kehidupan manusia. Manusia dituntut untuk menyesuaikan diri dengan keberadaan virus Corona. Untuk mencegah semakin meluasnya penyebaran virus tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait kewajiban untuk mematuhi protokol kesehatan termasuk di dalamnya penggunaan masker. Di kabupaten Jombang, angka penyebaran Covid-19 tergolong tinggi bahkan sempat menjadi satu-satunya zona merah di Jawa Timur. Dalam rangka mengendalikan penyebaran Covid-19, pemerintah mengeluarkan peraturan Bupati no 57 tahun 2020. Dalam implementasinya, kebijakan tersebut masih belum sepenuhnya dipatuhi oleh masyarakat. Masih banyak masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan terutama penggunaan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga aktivitas yaitu reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, tingkat kepatuhan masyarakat kabupaten Jombang terhadap kebijakan penggunaan masker tergolong tinggi ketika implementasi kebijakan tersebut diimbangi dengan pengawasan yang ketat. Namun kesadaran diri masyarakat akan penggunaan masker itu sendiri masih rendah sehingga tujuan dari implementasi kebijakan tersebut belum dapat dikatakan berhasil.

Kata kunci : implementasi; kebijakan; masker; Covid-19

Abstract

The global Covid-19 pandemic has changed all aspects of human life. Humans are required to adapt to the presence of the Coronavirus. To prevent the further spread of the virus, the government issued a policy regarding the obligation to comply with health protocols, including the use of masks. In the Jombang district, the spread of Covid-19 is relatively high and even became the only red zone in East Java. To control the spread of Covid-19, the government issued Peraturan Bupati no.57 tahun 2020. In its implementation, this policy has not been fully complied with by the public. There are still many people who ignore health protocols, especially the use of masks when doing activities outside the home. This study uses qualitative methods with data collection methods, namely interviews, documentation, and observation. Analysis of the data used in this study using Miles and Huberman consists of three activities, namely data reduction, data presentation, and conclusion or verification. The result of this study indicate that the level of compliance of the people of the Jombang district to the policy of using masks is high when the implementation of the

policy is balanced with strict supervision. However, public awareness of the use of masks itself is still low so that the purpose of implementing the policy cannot be said to be successful.

Keywords: implementation; policy; masks; Covid-19

Pendahuluan

Pandemi Covid-19 telah mengubah hampir seluruh sendi kehidupan manusia. Pandemi global tersebut memaksa manusia untuk menyesuaikan kehidupan dengan cara-cara baru guna memutus mata rantai penyebaran virus. Berbagai protokol kesehatan baru sesuai standar WHO (*World Health Organization*) terus disosialisasikan agar masyarakat mentaati aturan tersebut. Aturan-atruran baru tersebut antara lain, rajin mencuci tangan, menjaga jarak (*physical distancing*) serta menggunakan masker jika keluar rumah.

Di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait protokol kesehatan diantaranya melalui Keputusan Menteri Kesehatan tentang protokol kesehatan. Protokol kesehatan semakin berkembang dari yang awalnya 3M, yakni mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak, kemudian menjadi 5M dan sekarang telah menjadi 6M. Protokol kesehatan 6M tersebut meliputi mencuci tangan menggunakan sabun, menggunakan masker dengan benar, menjaga jarak, menghindari keramaian, menghindari makan bersama serta mengurangi mobilitas (Ipelona, 2021). Meskipun aturan tentang protokol kesehatan telah berkembang dari 3M menjadi 6M, namun aturan tentang menggunakan masker tetap ada. Berbagai kebijakan diambil oleh pemerintah dalam rangka upaya memutus mata rantai penyebaran *Covid-19*. Selain aturan tentang protokol kesehatan, pemerintah juga mengambil kebijakan-kebijakan yang sifatnya membatasi aktivitas masyarakat yang menyebabkan kerumunan misalnya pelarangan dan pembatasan tradisi mudik lebaran dan hari-hari besar keagamaan lainnya, pembatasan aktivitas ibadah di tempat-tempat ibadah serta beberapa peraturan lain.

Berbagai upaya dilakukan guna memutus mata rantai penyebaran virus *Corona*. Diperlukan adanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk menekan angka penyebaran *Covid-19*. Dibutuhkan aturan-aturan dari pemerintah untuk mencegah penyebaran virus *Corona*. Begitupun dari sisi masyarakat, diperlukan adanya disiplin dan kepatuhan untuk mentaati peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus *Corona*. Dalam hal ini, kesadaran masyarakat merupakan hal yang pokok atau kunci dari keberhasilan implementasi kebijakan protokol kesehatan termasuk didalamnya penggunaan masker. Pentingnya kesadaran masyarakat dalam keberhasilan implementasi kebijakan tersebut karena masyarakat sebagai sasaran kebijakan memiliki kewajiban untuk mendukung upaya pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran virus *Corona*.

Di kabupaten Jombang, tercatat lebih dari 5000 orang terinfeksi virus *Corona*. Data *realtime* dinas kesehatan kabupaten Jombang per 6 Juli 2021 pukul 15.00 mencatat sebanyak 5610 orang telah terinfeksi virus *Corona* (Dinkes.jombangkab.go.id, 2021). Bahkan kabupaten Jombang sempat menjadi satu-satunya zona merah di Jawa Timur

selama beberapa pekan pada bulan Pebruari 2021. Fakta tersebut seperti diberitakan pada media massa. Dalam pemberitaan tersebut, Bupati Jombang membenarkan bahwa pada saat itu kabupaten Jombang menjadi satu-satunya zona merah Covid-19 di Jawa Timur (Radarjombang.jawapos.com, 2021) Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran *Covid -19* di Jombang terjadi sangat meresahkan.

Dalam rangka mengantisipasi lonjakan kasus positif *Covid-19*, pemerintah kabupaten Jombang mengeluarkan Peraturan Bupati no.57 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019. Peraturan tersebut tentunya tidak akan ada artinya jika tidak diimbangi dengan kesadaran dan disiplin dari masyarakat dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19*. Selain itu, diperlukan pula upaya penegakan disiplin dari aparat pemerintah untuk mendisiplinkan perilaku masyarakat sehingga ada keselarasan antara peraturan dengan aktivitas masyarakat.

Salah satu upaya penegakan disiplin masyarakat akan protokol kesehatan, pemerintah daerah melalui satgas *Covid-19* rajin melakukan razia. Tindakan tersebut dilakukan untuk mengimbau masyarakat agar patuh terhadap protokol kesehatan serta memberikan sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Razia yang digelar diharapkan mampu meningkatkan kedisiplinan masyarakat untuk patuh terhadap aturan-aturan protokol kesehatan. Satu diantara protokol kesehatan yang disosialisasikan adalah penggunaan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Penggunaan masker ini menjadi sangat penting karena diklaim mampu mencegah penularan *Covid-19* diatas 50% (Nasional, n.d.). Penggunaan masker yang tepat akan mampu meminimalisir penularan virus *Corona*.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa penggunaan masker akan mampu menekan angka penyebaran *Covid-19*. Oleh sebab itu diperlukan kesadaran masyarakat untuk tertib terhadap protokol kesehatan utamanya penggunaan masker. Penggunaan masker yang tepat sebenarnya dimaksudkan untuk kesehatan dan keselamatan diri masyarakat sendiri. Sehingga diharapkan ketika masyarakat tertib protokol kesehatan, pandemi *Covid-19* dapat segera berakhir dan kehidupan berjalan kembali normal. Namun pada kenyataan dilapangan, masih banyak pelanggaran terhadap protokol kesehatan termasuk penggunaan masker. Banyak dari kalangan masyarakat yang masih enggan menggunakan masker atau menggunakan masker secara tepat di ruang publik dengan berbagai alasan. Minimnya kesadaran masyarakat akan perlindungan diri dari penyebaran virus *Covid-19* ini menjadi salah satu faktor tingginya angka penularan virus *Corona* di kabupaten Jombang.

Adanya regulasi tentang protokol kesehatan utamanya tentang penggunaan masker dapat dikatakan sebagai salah satu alternatif solusi dalam rangka menertibkan masyarakat agar lebih waspada terhadap bahaya virus *Corona*. Peraturan yang mengikat sedikit banyak telah membantu menekan angka penyebaran *Covid-19* khususnya di kabupaten Jombang meskipun tidak sedikit pula masyarakat yang masih melanggar

aturan protokol kesehatan. Dalam hal ini diperlukan peran pemerintah untuk menegakkan kedisiplinan masyarakat terkait protokol kesehatan utamanya penggunaan masker.

Penegakkan disiplin terhadap protokol kesehatan khususnya penggunaan masker perlu dilakukan agar masyarakat tertib sehingga angka penyebaran *Covid-19* dapat ditekan. Namun hendaknya penegakkan disiplin ini berlaku secara menyeluruh dalam arti tidak perlu dipilih-pilih masyarakat mana yang perlu ditertibkan. Karena kebijakan penggunaan masker ini bersifat menyeluruh untuk segala lapisan masyarakat. Artinya kebijakan tersebut harus dilaksanakan dan didukung penuh dalam pelaksanaannya. *Public policy is whatever government choose to do or not to do* (Dye, 2017). Disini berarti kebijakan publik bersifat memaksa. Kebijakan apapun yang diambil pemerintah harus dilaksanakan dan dipatuhi dengan baik.

Dalam kebijakan penggunaan masker ini, nampaknya masih banyak pelanggar yang luput dari pantauan penegak disiplin protokol kesehatan. Hal ini seperti diungkapkan oleh pakar epidemiologi Universitas Airlangga, Dr. Windhu Purnomo, dikutip dari news.detik.com yang mengatakan bahwa razia terhadap protokol kesehatan haruslah dilakukan di segala penjuru, tidak hanya para pengguna jalan yang tidak bermasker namun juga di titik-titik keramaian seperti pasar (Meilisa, 2020). Penegakan disiplin penggunaan masker ini perlu untuk sering dilakukan agar masyarakat lebih waspada terhadap bahaya *Covid-19*. Para penegak disiplin protokol kesehatan dalam hal ini Satgas *Covid-19* perlu untuk lebih gencar melakukan razia penggunaan masker di tempat-tempat yang menjadi pusat keramaian mengingat masih banyaknya pelanggaran terhadap peraturan ini. Selain itu sosialisasi terkait bahaya *Covid-19* serta peraturan terkait protokol kesehatan khususnya penggunaan masker harus terus dilakukan untuk menggugah kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga diri dari penularan virus *Corona*.

Kebijakan penggunaan masker ini sebenarnya mampu menjadi alternatif solusi dalam rangka pengendalian penularan *Covid-19* di masyarakat jika diimplementasikan dengan tepat. Namun sayangnya, implementasi kebijakan ini tidak dapat sepenuhnya sesuai dengan harapan. Banyaknya pelanggaran yang terjadi terkait kebijakan penggunaan masker ini juga merupakan wujud dari belum optimalnya implementasi kebijakan tersebut. Masih banyak masyarakat yang mengabaikan atau meremehkan peraturan penggunaan masker ini sehingga hasil dari implementasi kebijakan ini belum dapat dirasakan secara maksimal.

Banyaknya pelanggaran terkait kebijakan penggunaan masker menunjukkan bahwa keberhasilan dalam implementasi kebijakan tersebut belum dapat dikatakan berhasil. Tujuan dari kebijakan tersebut belum sepenuhnya tercapai. Selain itu, kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi peraturan terkait kebijakan protokol kesehatan termasuk penggunaan masker masih rendah. Hal ini menjadi permasalahan yang menarik untuk diteliti lebih jauh.

Metode

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis implementasi kebijakan protokol kesehatan terutama penggunaan masker pada masyarakat Kabupaten Jombang. Fokus utama pada penelitian ini adalah untuk menguraikan tentang implementasi kebijakan penggunaan masker terutama yang berkaitan dengan kepatuhan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi peraturan protokol kesehatan termasuk penggunaan masker. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang di dalamnya berisi tentang bagaimana menggunakan dan mengumpulkan material-material empiris yang menggambarkan kejadian-kejadian rutin serta makna dalam kehidupan individual (Ahmadi, 2014). Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer yang berasal dari hasil wawancara dengan informan, data hasil observasi dan dokumentasi. Selain itu, digunakan pula data sekunder yang berasal dari dokumen-dokumen penunjang yang relevan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi (Moleong, 2011). Wawancara dilakukan dengan masyarakat dan penegak disiplin protokol kesehatan sebagai informan. Analisis data yang digunakan menggunakan Miles and Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi (Miles, 2009).

Hasil Dan Pembahasan

Pentingnya penggunaan masker di era pandemi Covid-19 dimaksudkan untuk mencegah penyebaran virus agar tidak semakin meluas. Diperlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat agar tujuan tersebut dapat tercapai. Adanya kebijakan yang mengatur hal tersebut merupakan perwujudan dari tanggung jawab pemerintah dalam rangka penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19. Namun bagaimana implementasi kebijakan tersebut akan dipaparkan seperti berikut ini.

Kebijakan Publik dalam Penggunaan Masker

Pandemi global *Covid-19* telah memaksa masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keberadaan virus *Corona*. Berbagai kebijakan ditempuh guna memutus mata rantai penyebaran *Covid-19*. Adanya aturan protokol kesehatan mau tidak mau membuat masyarakat harus patuh untuk menghindari terpapar virus *Corona*. Kebijakan tersebut ditempuh oleh pemerintah untuk mengendalikan laju perkembangan penularan virus *Corona*.

Kebijakan publik seperti yang dikemukakan Thomas R. Dye adalah *whatever government choose to do or not to do* (Dye, 2017). Dalam hal ini jelas bahwa kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukannya. Kebijakan merupakan keputusan pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan dengan tujuan tertentu. Kebijakan publik juga mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Dari definisi kebijakan yang dikemukakan Thomas R.

Dye dapat dilihat adanya unsur kekuasaan dalam proses kebijakan publik. Pemerintah sebagai penguasa yang mengatur hubungan dengan masyarakat sebagai pihak yang dikuasai. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku masyarakat diatur oleh negara melalui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Dalam kebijakan protokol kesehatan termasuk didalamnya adalah penggunaan masker, diperlukan adanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam implementasi kebijakan tersebut akan membuat kebijakan berjalan dengan efektif sesuai dengan tujuan. Kebijakan penggunaan masker ini memiliki tujuan untuk memutus mata rantai penyebaran *Covid-19*, yang mana kebijakan ini menitikberatkan pada perlindungan dan keselamatan diri masyarakat sendiri sebagai sasaran kebijakan serta orang-orang disekitarnya. Implementasi kebijakan protokol kesehatan termasuk penggunaan masker ini memerlukan dukungan penuh dari masyarakat sebagai sasaran kebijakan dalam rangka mewujudkan efektivitas dan keberhasilan tujuan kebijakan itu sendiri.

Praktik Kebijakan Penggunaan Masker

Kebijakan yang diambil pemerintah terkait protokol kesehatan (termasuk di dalamnya penggunaan masker) yaitu bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran virus *Corona* di era pandemi ini. Kebijakan ini ditempuh untuk melindungi masyarakat dari bahaya virus *Corona*. Penyebaran virus yang begitu masif membuat pemerintah harus mengambil langkah cepat agar penularan *Covid-19* tidak semakin meluas. Kebijakan tersebut harus dilaksanakan sebaik mungkin agar pandemi *Covid-19* segera berakhir.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang harus segera dilaksanakan setelah sebuah kebijakan diputuskan. Keberhasilan dari sebuah kebijakan tidak akan terwujud jika tidak diimplementasikan. Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang mengarah pada jalannya pelaksanaan kebijakan yang ditujukan kepada kelompok sasaran, dalam rangka mewujudkan tujuan kebijakan (Handoyo, 2012). Di sini terlihat bahwa dalam implementasi kebijakan terdapat unsur-unsur yang tidak bisa dilepaskan. Unsur-unsur tersebut mutlak adanya, yaitu kebijakan itu sendiri, pelaksana serta tujuan dari kebijakan tersebut (Subianto, 2020).

Akib menyebut implementasi kebijakan diperlukan untuk melihat seberapa jauh kepatuhan dari kelompok sasaran kebijakan. Oleh sebab itu, bila ditinjau dari perspektif perilaku, tingkat kepatuhan kelompok sasaran kebijakan menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan (Akib, 2010). Kepatuhan masyarakat terhadap suatu kebijakan akan menentukan sejauh mana keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Kebijakan publik pada hakikatnya bertujuan untuk menciptakan situasi dan suasana kondusif dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Anggara bahwa kebijakan publik merupakan upaya dalam mengatur proses serta mekanisme pemerintahan sehingga tercipta situasi dan kondisi yang kondusif (Anggara, 2014). Jika

melihat pernyataan tersebut, maka terciptanya kondusivitas dalam masyarakat tidak dapat terlepas dari proses implementasi kebijakan publik.

Lebih lanjut Anggara (2014) menyatakan adanya keterkaitan antara kebijakan publik dan kepercayaan publik. Hubungan keduanya akan berpengaruh kepada efektivitas kebijakan dan kondusivitas publik. Efektivitas kebijakan terwujud dalam bentuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, sementara kondusivitas publik salah satunya dapat dilihat dari kemudahan dalam pemahaman dan implementasi kebijakan serta dukungan terhadap kebijakan tersebut (Anggara, 2014). Kebijakan akan efektif jika didukung oleh masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Setiap kebijakan pasti menimbulkan pro dan kontra. Berbagai respon dan reaksi masyarakat pasti menyertai proses kebijakan tersebut. Reaksi terkait proses kebijakan tidak selalu positif. Seringkali masyarakat bereaksi kontra terhadap suatu kebijakan. Hal tersebut sangat wajar terjadi sebagai wujud dari demokrasi.

Namun begitu, penegakan terkait kebijakan protokol kesehatan termasuk penggunaan masker tetap harus dilakukan. Hal ini bertujuan agar masyarakat patuh terhadap kebijakan tersebut. Penegakan disiplin terhadap suatu kebijakan atau aturan bukanlah sekadar pelaksanaan terhadap aturan-aturan tersebut. Penegakan aturan juga meliputi masalah pokok yang melanda serta faktor-faktor yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung (Lystianingrum & Philona, 2021).

Implementasi kebijakan protokol kesehatan termasuk di dalamnya adalah penggunaan masker merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengendalikan penyebaran virus *Corona* di tengah masyarakat. Hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat tetap dapat beraktivitas diluar rumah di tengah pandemi *Covid-19*. Tetapi apabila dalam implementasinya kebijakan tersebut tidak sesuai dengan aturan dan arahan yang ada maka pengendalian penyebaran virus *Corona* tidak akan berjalan efektif bahkan angka positif *Covid-19* akan semakin bertambah (Wahyuni & Hertati, 2021).

Implementasi Kebijakan Penggunaan Masker di kabupaten Jombang

Pandemi global *Covid-19* yang terjadi di seluruh dunia telah mengubah segala aspek kehidupan. Adaptasi terhadap cara-cara baru kehidupan terus dilakukan. Aturan-aturan baru terus dibuat dan disosialisasikan kepada masyarakat agar roda kehidupan tetap berputar di tengah pandemi global *Covid-19*. Masyarakat terus berjibaku melawan pandemi *Covid-19* ini. Disisi lain, peran pemerintah dalam mengatasi dampak pandemi ini sangat diperlukan. Berbagai regulasi dan kebijakan dikeluarkan pemerintah agar masyarakat tetap dapat menjalankan roda kehidupannya.

Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus *Corona* adalah dengan penegakan protokol kesehatan. Regulasi tentang protokol kesehatan telah dibuat dan terus disosialisasikan. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang apatis terhadap aturan tersebut. Hal ini membuat upaya memutus mata rantai penyebaran *Covid-19* belum bisa dikatakan berhasil.

Di Kabupaten Jombang, kebijakan terkait protokol kesehatan diatur dalam Peraturan Bupati no. 57 tahun 2020. Dalam pasal 4 regulasi tersebut mengatur tentang penggunaan masker bagi perorangan jika beraktivitas di luar rumah atau berinteraksi dengan orang lain. Peraturan tentang penggunaan masker ini terus disosialisasikan kepada masyarakat. Selain itu penegakan disiplin terkait protokol kesehatan utamanya penggunaan masker juga terus dilakukan guna menertibkan masyarakat yang masih abai terhadap peraturan tersebut.

Regulasi tentang protokol kesehatan terutama penggunaan masker ini bertujuan untuk menekan angka penyebaran virus *Corona* di masyarakat. Peraturan tersebut dibuat agar masyarakat dapat terhindar dari penularan virus *Corona*. Penggunaan masker ini selain untuk menjaga diri sendiri dari tertularnya virus *Corona* juga menjaga orang-orang disekitarnya dari wabah tersebut. Penggunaan masker secara benar akan dapat mengurangi resiko penyebaran *Covid-19*.

Namun masyarakat seolah tidak menghiraukan peraturan tersebut. Masih banyak masyarakat yang mengacuhkan pentingnya penggunaan masker bagi kesehatan mereka. Berbagai alasan dikemukakan mereka yang enggan menggunakan masker. Mulai dari panas, pengap, tidak nyaman hingga menganggap *Corona* tidak ada menjadi alasan orang-orang enggan bermasker. Penggunaan masker dianggap menghambat aktivitas mereka. Dari hasil wawancara dengan, Hari, pedagang kaki lima di sekitar Jl. KH. Hasyim Ashari Jombang pada tanggal 15 April 2021 yang mengatakan alasannya enggan menggunakan masker:

...“sumpek, sumuk, mboten nyaman. (pengap, panas, tidak nyaman)”...

Sumber: Diolah dari data primer

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, pasar selama ini tergolong tempat yang paling sering memunculkan pelanggaran terhadap kebijakan penggunaan masker. Dari hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa mayoritas pedagang di pasar tidak menggunakan masker. Namun bukan berarti kondisi tersebut luput dari pantauan dan sosialisasi kebijakan protokol kesehatan. Sosialisasi terhadap penggunaan masker telah dilakukan di pasar-pasar. Poster dan imbauan kepada masyarakat telah terpampang pada sudut-sudut strategis sehingga mudah terlihat. Selain itu, razia terkait peraturan protokol kesehatan juga rutin dilakukan namun hal tersebut belum juga mampu menggugah kesadaran masyarakat akan bahaya virus *Corona* dan pentingnya penerapan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan terhadap penyebarannya.

Di pasar Peterongan Jombang yang sempat menjadi klaster penularan Covid-19 pada awal masa pandemi, telah terpampang imbauan untuk mematuhi aturan protokol kesehatan termasuk penggunaan masker di pintu masuk utama. Adanya imbauan yang melarang siapapun yang tidak bermasker untuk tidak memasuki area pasar sepertinya kurang menjadi perhatian masyarakat terutama para pedagang dan pengunjung pasar. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya jumlah orang yang patuh terhadap aturan penggunaan

masker di tempat tersebut. Kebanyakan dari pedagang di pasar Peterongan terlihat tidak menggunakan masker dalam aktivitas kesehariannya di tempat tersebut.

Mayoritas pedagang di pasar Peterongan mengaku enggan menggunakan masker. Alasannya bermacam-macam, ada yang mengatakan pengap. Ada pula yang mengatakan panas. Selain itu ada pula yang mengaku tidak percaya dengan *Corona*. Mereka tetap berinteraksi seperti biasanya saat dalam keadaan sebelum pandemi Covid-19 terjadi. Hasil wawancara dengan Peni, pedagang sayur di pasar Peterongan pada tanggal 24 Mei 2021 yang mengungkapkan alasan enggan menggunakan masker, mengatakan bahwa:

..."wong kita lahir *nggak* pakai baju, kok sekarang *tuwek* (tua) *kongkon* (disuruh) *maskeran* (menggunakan masker). Kita itu punya Gusti Allah. *Mosok wedi karo* (apa iya takut dengan) *Corona? Nggak usah* takut dengan *Corona*" ...
Sumber: diolah dari data primer

Ungkapan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Siswanto, pedagang tempe di pasar Peterongan dari hasil wawancara di tanggal yang sama mengatakan bahwa:

..."*mboten* (tidak). Pengap" ...
Sumber: diolah dari data primer

Berdasarkan hasil observasi, razia kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan protokol kesehatan di tempat tersebut dilakukan setidaknya 2 hingga 3 kali dalam seminggu. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Musfiatul, pedagang sembako di pasar Peterongan dari wawancara yang dilakukan pada tanggal 24 Mei 2021 yang mengatakan bahwa:

..."ada, kalau pagi. Biasanya seminggu dua kali" ...
Sumber: diolah dari data primer

Senada dengan hal tersebut, Peni dalam wawancara pada hari yang sama mengatakan bahwa:

..."razia itu setiap hari Senin dan Kamis pagi" ...
Sumber: diolah dari data primer

Tidak berbeda jauh dari kedua pernyataan diatas, Yusuf Hidayat, koordinator UPT (Unit Pelaksana Teknis) pasar Peterongan dalam wawancara pada hari yang sama mengatakan bahwa:

..."Ada. Razia disini dilakukan satu minggu dua sampai tiga kali" ...
Sumber: diolah dari data primer

Para pedagang mengatakan bahwa ketika razia dilakukan, mereka patuh terhadap kebijakan tersebut. Mereka mengaku menggunakan masker saat terjadi razia. Namun setelah razia berakhir, para pedagang mengaku melepas kembali masker yang mereka kenakan. Seperti yang diungkapkan oleh Musfiatul dalam wawancara tanggal 24 Mei 2021, yang mengatakan bahwa:

..."ooo...kalau ada razia ya semua pakai masker. Tapi nanti kalau polisinya sudah pergi ya lepas lagi" ...

Sumber: diolah dari data primer

Tidak berbeda jauh dengan ungkapan Peni dalam wawancara yang dilakukan pada hari yang sama, mengatakan bahwa:

..."kalau ada razia semuanya pakai masker. Tapi *nek petugase wis ngalih yo dicopot maneh* (kalau petugasnya sudah pergi ya dilepas lagi). Kecuali aku. Aku *nek enek* (kalau ada) razia *rokokan gak ngono mangan* (merokok kalau tidak begitu makan). *Nek rokokan* (kalau sedang merokok), makan *nggak* apa-apa *nggak maskeran* (tidak pakai masker). Tapi *nek ning dalan yo maskeran, wedi didendo satus ewu* (tetapi kalau di jalan ya pakai masker, takut didenda seratus ribu)"...

Sumber: diolah dari data primer

Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh pihak pengelola pasar. Nursila Cahyaningrum, Kepala Bidang Pasar Dinas Perdagangan Kabupaten Jombang dalam wawancara pada tanggal 24 Mei 2021 mengatakan bahwa:

..."Razia itu ada. Rutin. Tapi ya namanya orang ya, tingkahnya macam-macam. Kalau pas razia, semuanya tertib. Pakai masker semua. Tapi selesai razia ya sudah. Nah kita kan *nggak bisa ngontrol* yang seperti itu"...

Sumber: diolah dari data primer

Dari sisi penegak disiplin protokol kesehatan juga menyatakan bahwa razia digelar rutin dan sering. Bahkan razia bisa dilaksanakan hingga tujuh kali dalam satu hari di lokasi yang berbeda-beda. Seperti yang diungkapkan oleh kepala bidang ketertiban umum dan sumber daya aparatur satpol Pamong Praja kabupaten Jombang, Wahib, pada wawancara yang dilaksanakan tanggal 29 Juni 2021, menyatakan bahwa:

..."operasi ada terus. Bahkan satu hari bisa empat sampai tujuh kali. Di lokasi yang berbeda. Kadang-kadang dalam satu waktu bisa dibagi dalam dua tim yang disebar di lokasi yang berbeda"...

Sumber: diolah dari data primer

Pengelola pasar bahkan sempat menutup pasar dan memberlakukan jadwal ganjil genap untuk menghindari kerumunan dan keramaian serta agar mudah memantau ketertiban terhadap protokol kesehatan. Selain itu, pengelola pasar juga telah membagikan 1000 lembar masker agar para pedagang di tempat tersebut patuh terhadap protokol kesehatan terutama penggunaan masker.

Di tempat lain, razia masker juga rutin dilakukan oleh penegak disiplin di jalan-jalan di kabupaten Jombang. Namun seringkali masih banyak ditemukan pelanggaran terhadap peraturan tersebut. Masyarakat yang beraktivitas di jalan-jalan di kabupaten Jombang seringkali melalaikan penggunaan masker. Ada juga masyarakat yang membawa masker namun tidak menggunakannya secara tepat dan baru menyempurnakan penggunaannya ketika melihat ada petugas razia.

Rasa enggan menggunakan masker pada masyarakat ini muncul dari berbagai macam kalangan. Keengganan tersebut tidak hanya muncul dari masyarakat dengan tingkat pendidikan dan sosial ekonomi kelas menengah ke bawah. Banyak pula masyarakat dengan tingkat pendidikan yang tinggi dan sosial ekonomi menengah ke atas yang tidak patuh terhadap kebijakan penggunaan masker ini. Dari hasil wawancara pada tanggal 2 Mei 2021 dengan Eni, seorang tenaga pendidik di salah satu perguruan tinggi mengungkapkan bahwa:

..."saya itu kalau di rumah, di dalam ruangan, di kantor seperti ini ya *nggak* pakai masker. Pengap. Nafasnya *nggak* enak. Tapi kalau ke pasar ya pakai"...

Sumber: diolah dari data primer

Tidak berbeda jauh dengan pernyataan tersebut, seorang dosen di salah satu perguruan tinggi saat diwawancara pada tanggal 17 Juni bercerita tentang pengalamannya ketika terjadi razia di depan kampusnya. Ia mengatakan bahwa:

..."tadi ada razia, malu aku *mosok* dosen *nggak* pakai masker? Langsung *tak* pakai maskerku. *Males* aku pakai masker, *nggak* bisa nafas"...

Sumber: diolah dari data primer

Dari wawancara tersebut diketahui bahwa perasaan enggan memakai masker juga terjadi pada masyarakat dengan tingkat pendidikan yang tinggi.

Namun disisi lain, ada pula masyarakat yang patuh akan peraturan penggunaan masker. Secara sadar mereka menggunakan masker walaupun tidak sedang ada razia. Mereka menyadari bahaya virus *Corona* sehingga menganggap kebijakan protokol kesehatan ini berperan penting dalam mencegah penyebaran Covid-19. Selain itu, mereka juga menganggap masker yang mereka pakai memiliki andil menyelamatkan orang-orang di sekitarnya dari bahaya Covid-19. Seperti terungkap dari wawancara dengan Musfiatul, pedagang sembako di pasar Peterongan pada tanggal 24 Mei 2021 yang mengatakan bahwa:

..."takut. *Soalnya* pernah kena. Sejak kena itu selalu pakai masker kalau keluar. Apalagi suami saya juga punya diabetes"...

Sumber: diolah dari data primer

Penyebaran Covid-19 yang begitu cepat, membuat masyarakat harus meningkatkan kewaspadaannya. Masyarakat yang patuh terhadap kebijakan penggunaan masker mengaku setuju dengan kebijakan tersebut. Seperti yang diungkapkan Sarifah, mahasiswa salah satu perguruan tinggi dalam wawancara pada tanggal 18 April 2021 yang mengatakan:

..."sudah biasa pakai masker kalau keluar rumah dari sebelum Corona biar *nggak* kena debu. Sekarang ada Corona

ya sudah terbiasa. *Nggak* masalah (mentaati peraturan tentang masker)"...

Sumber: diolah dari data primer

Hal senada diungkapkan oleh Hani, seorang karyawan dalam wawancara pada 20 April 2021, mengungkapkan:

..."takut. *Lha* situasinya *kayak* (seperti) ini. *Nggak* pernah kena razia, ya takut *aja*"...

Sumber: diolah dari data primer

Masyarakat yang patuh terhadap kebijakan masker ini sebagian besar mengaku takut terhadap bahaya virus *Corona*. Namun ada pula yang mengaku sudah terbiasa memakai masker jika keluar rumah sejak sebelum adanya pandemi Covid-19 ini. Seperti yang diungkapkan Jeje, pekerja media dalam wawancara pada tanggal 9 Mei 2021, yang menyebut:

..."kebiasaan *aja*. Dari dulu pakai masker kalau keluar rumah. Sekarang ada *Corona* ya malah semakin rajin pakai masker. Bukan takut, ya waspada *aja*. *Lagian* kan ada peraturan juga sekarang kemana-mana harus pakai masker"...

Sumber: diolah dari data primer

Masyarakat yang patuh terhadap kebijakan penggunaan masker pada masa pandemi Covid-19 tidak keberatan dengan adanya kebijakan tersebut. Bahkan sebagian dari mereka mengaku telah terbiasa memakai masker jika keluar rumah sejak sebelum pandemi Covid-19. Namun ada pula yang mengaku rajin memakai masker sejak pandemi Covid-19 dan hanya sebatas karena peraturan. Hal ini terungkap dalam wawancara dengan seorang dokter di salah satu klinik di kecamatan Diwek Jombang pada tanggal 29 Mei 2021 yang mengatakan:

..."karena SOP (*Standard Operational Procedure*). Sebelumnya kalau praktek *nggak* pernah pakai. *Sumuk* (panas). Sekarang selalu pakai karena ada aturannya"...

Sumber: diolah dari data primer

Ditinjau dari sisi penegak disiplin, data hasil evaluasi satgas bidang penegakan hukum dan pendisiplinan kabupaten Jombang yang dipaparkan oleh Drs. Agus Susilo, Kasatpol PP Kabupaten Jombang pada tanggal 8 Juni 2021 menunjukkan bahwa jumlah pelanggaran terhadap protokol kesehatan terutama penggunaan masker masih tinggi. Hasil operasi gabungan pada tanggal 1 Januari hingga 10 Mei 2021 mencatat 135 pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh perorangan, mayoritas merupakan pelanggaran terhadap penggunaan masker. Operasi terhadap protokol kesehatan yang dilakukan pada tanggal 14 sampai 31 Mei 2021 mencatat ada pelanggaran sebanyak 311 pelanggar yang dilakukan oleh perorangan, tentu saja sebagian besar adalah pelanggaran terhadap penggunaan masker. 278 pelanggar yang dilakukan oleh perorangan tercatat

pada operasi gabungan penertiban terhadap protokol kesehatan yang dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 8 Juni 2021.

Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan, membuat pemerintah menetapkan sanksi bagi para pelanggarnya. Beberapa macam sanksi ditetapkan untuk memberikan efek jera kepada para pelanggar protokol kesehatan. Sanksi-sanksi tersebut antara lain, teguran lisan hingga sanksi sosial seperti pembuatan surat pernyataan atau penyitaan KTP (Kartu Tanda Penduduk) selama jangka waktu tertentu. Sedangkan pengenaan sanksi denda untuk perorangan sudah dihapuskan. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan 1, seorang penegak disiplin dari satpol PP (Pamong Praja) Jombang dalam wawancara tanggal 29 Juni 2021 yang mengatakan bahwa:

..."sanksi denda sudah *nggak* ada. Ya kita lihat kondisinya seperti ini, kalau dikenakan denda ya kasihan. Kadang-kadang penghasilannya *nggak* cukup buat bayar denda"...

Sumber: diolah dari data primer

Senada dengan pernyataan tersebut, kepala bidang ketertiban umum dan sumber daya aparatur satpol Pamong Praja kabupaten Jombang, Wahib dalam wawancara yang dilakukan pada hari yang sama mengatakan bahwa:

..."denda sudah *nggak*. Kita mengikuti instruksi dari atas, *nggak* boleh sembarangan. Kasihan (dikenakan denda) kondisi seperti ini. ya kita kan punya hati nurani"...

Sumber: diolah dari data primer

Semakin tingginya angka pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap kebijakan penggunaan masker semakin rendah. Masyarakat semakin hari semakin mengabaikan protokol kesehatan terutama penggunaan masker. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan masker ini dipicu oleh grafik penurunan angka konfirmasi positif Covid-19 di kabupaten Jombang yang semakin melandai pada sekitar pertengahan bulan Mei hingga awal Juni 2021. Dalam rentang waktu tersebut, data dinas kesehatan kabupaten Jombang menunjukkan tidak ada satupun kecamatan di Jombang yang menjadi zona merah. Data kasus aktif Covid-19 hari sabtu 15 Mei 2021 pukul 12.00 menunjukkan sebanyak 26 orang terinfeksi virus *Corona*. Pada hari Jumat, 11 Juni 2021 pukul 14.00 tercatat sebanyak 22 kasus aktif Covid-19. Data tersebut menunjukkan bahwa kasus aktif Covid-19 antara rentang waktu tersebut relatif stabil dan tidak ada lonjakan yang signifikan (Dinkes.jombangkab.go.id, 2021). Hal ini menyebabkan masyarakat lengah dan mengabaikan protokol kesehatan.

Kebijakan protokol kesehatan ini termasuk di dalamnya penggunaan masker saat beraktivitas di luar rumah merupakan wujud upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dari pemerintah. Kebijakan ini tidak akan berhasil jika tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat. Namun jika dilihat dari masih banyaknya jumlah pelanggaran terhadap kebijakan penggunaan masker ini dapat diketahui bahwa kebijakan ini belum dapat

dikatakan berhasil. Tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan masih rendah. Seperti diungkapkan oleh informan 1, seorang penegak disiplin dari satpol Pamong Praja kabupaten Jombang dalam wawancara tanggal 29 Juni 2021, yang menyebutkan bahwa:

..."kesadaran masyarakat masih minim. Masyarakat belum sadar bahwa peraturan ini dibuat sebenarnya untuk kepentingan mereka sendiri. Mencegah kan lebih baik daripada mengobati. Mayoritas yang melanggar itu dari kelas menengah ke bawah, tapi bukan berarti tidak ada dari kalangan terpelajar, banyak juga"...

Sumber: diolah dari data primer

Ungkapan serupa juga disampaikan oleh Wahib, kepala bidang ketertiban umum dan sumber daya aparatur satpol Pamong Praja kabupaten Jombang dalam wawancara pada hari yang sama, menyebutkan:

..."masyarakat kurang kesadarannya. Masalah Covid-19 ini kan tanggung jawab bersama. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Itu yang kadang-kadang masyarakat belum sadar"...

Sumber: diolah dari data primer

Melihat fakta tersebut, diperlukan peran pemerintah dalam penegakan aturan protokol kesehatan. Dalam hal ini pemerintah melalui satgas Covid-19 gencar melakukan razia dan sosialisasi terkait kebijakan protokol kesehatan termasuk penggunaan masker. Razia dan sosialisasi tersebut tidak selalu berjalan mulus. Seringkali terjadi perlawanan dari masyarakat. Berbagai alasan dikemukakan oleh masyarakat yang melakukan perlawanan, mulai dari pengap, masker ketinggalan, buru-buru bahkan yang menganggap Covid-19 tidak ada.

Hal ini seperti diungkap oleh informan 1, penegak disiplin dari satpol Pamong Praja kabupaten Jombang dalam wawancara tanggal 29 Juni 2021, yang menyebutkan:

..."perlawanan pasti ada. Tapi ya kita beri imbauan, sosialisasi. Pelan-pelan lah. Kadang-kadang orang itu menerjemahkan peraturan terlalu kaku. Jadi misalnya di dalam mobil sendirian kaca tertutup semua tetap ditindak. Ya *nggak* begitu lah. Kalau kondisi seperti itu ya sekadar kita ingatkan agar tidak lupa menjaga protokol kesehatan"...

Sumber: diolah dari data primer

Lebih lanjut ditambahkan oleh Wahib, kepala bidang ketertiban umum dan sumber daya aparatur satpol Pamong Praja kabupaten Jombang dalam wawancara pada hari yang sama, mengatakan:

..."ada (perlawanan). Tapi ya kita kasih imbauan, pelan-pelan. Lha kita kan pelayan masyarakat jadi ya harus pelan-pelan kita ingatkan"...

Sumber: diolah dari data primer

Kebijakan protokol kesehatan termasuk di dalamnya penggunaan masker ini perlu dukungan dari seluruh lapisan masyarakat agar pandemi Covid-19 ini segera berakhir. Kesadaran masyarakat merupakan salah satu kunci dalam upaya mencapai keberhasilan kebijakan penggunaan masker ini. Diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat agar tujuan dari suatu kebijakan dapat dicapai.

Pandemi Covid-19 ini merupakan tanggung jawab bersama. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah namun juga masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam pencegahan penularan virus *Corona ini*. Tanggung jawab bersama ini diperlukan agar pandemic Covid-19 segera berakhir dan kehidupan akan berjalan kembali normal.

Wujud dari tanggung jawab bersama dalam rangka penanganan Covid-19 di Kabupaten Jombang ini adalah Keputusan Bupati Jombang no. 348 tahun 2020 tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Jombang. Dalam keputusan tersebut, satuan tugas penanganan Covid-19 (satgas covid) terdiri dari berbagai sektor. Mulai dari aparat pemerintah hingga akademisi. Mulai dari tingkat kabupaten hingga RT/ RW. Semuanya harus turut aktif dalam pencegahan penyebaran virus *Corona*.

Namun kebijakan tersebut seolah berbanding terbalik dengan fakta di lapangan. Di kampung-kampung masih banyak kerumunan terjadi. Ibu-ibu yang bersosialisasi sambil berbelanja dimana hampir semua tidak menggunakan masker. Anak-anak yang belajar dari rumah namun sebagian besar waktunya digunakan untuk bermain-main bersama teman-temannya tanpa menggunakan masker masih menjadi hal yang wajar di tengah masyarakat. Adanya kampung tangguh pun belum dapat dimanfaatkan secara maksimal jika dilihat dari penambahan kasus yang terus terjadi setiap harinya.

Fenomena ini tidak berbeda jauh dengan keadaan di lingkungan institusi pendidikan. Beberapa kampus di Kabupaten Jombang tetap mengadakan pembelajaran tatap muka dan kegiatan-kegiatan tetap berjalan seperti biasa. Adanya imbauan tentang protokol kesehatan seolah-olah hanya sebagai bumbu di era pandemi Covid-19 ini. Masih banyak ditemukan kerumunan tanpa menggunakan masker ataupun menggunakan masker secara tidak tepat. Hal tersebut sepertinya luput dari pantauan Satgas Covid-19.

Kurangnya kesadaran masyarakat bahwa Covid-19 adalah tanggung jawab bersama membuat kebijakan protokol kesehatan termasuk penggunaan masker ini terkesan tidak efektif. Padahal jika melihat dari penelitian-penelitian kesehatan tentang Covid-19, penerapan protokol kesehatan termasuk di dalamnya penggunaan masker yang tepat akan dapat menekan angka penularan virus *Corona*. Harus disadari oleh seluruh lapisan masyarakat bahwa kebijakan protokol kesehatan termasuk penggunaan masker tujuan utamanya adalah melindungi diri sendiri dan orang-orang sekitar dari penularan virus *Corona*. Untuk itu, diperlukan adanya tanggung jawab dari masing-masing individu untuk patuh dan taat dalam melaksanakan kebijakan protokol kesehatan termasuk di dalamnya penggunaan masker.

Dari data-data hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa masyarakat hanya sebatas patuh terhadap kebijakan penggunaan masker saat ada pengawasan. Namun kesadaran akan pentingnya menjaga diri dari paparan virus *Corona* masih minim. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan dari kebijakan tersebut belum tercapai secara maksimal. Menurut Anggara (2014) sejatinya tujuan dari implementasi kebijakan adalah menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif di tengah masyarakat. Terciptanya kondusifitas dalam masyarakat dipengaruhi oleh implementasi kebijakan. Dalam hal ini jika dilihat dari implementasi kebijakan penggunaan masker, agaknya tidak berlebihan jika kepatuhan masyarakat akan peraturan tersebut cukup tinggi apabila diimbangi dengan pengawasan yang ketat. Namun jika ditinjau dari tujuan kebijakan itu sendiri, masih belum dapat dikatakan berhasil. Indikator kurang berhasilnya implementasi kebijakan ini dapat dilihat dari masih banyaknya pelanggaran terhadap protokol kesehatan utamanya penggunaan masker di ruang-ruang publik. Selain itu, penambahan kasus konfirmasi positif Covid-19 yang masih saja terjadi hari demi hari.

Akib (2010) menyebut bahwa tingkat kepatuhan sasaran dalam implementasi kebijakan merupakan faktor yang menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Jika ditinjau dari kasus kebijakan penggunaan masker pada masyarakat di Kabupaten Jombang ini, kebijakan tersebut belum dapat dikatakan berhasil. Tingkat kepatuhan masyarakat tergolong tinggi jika berada dalam pengawasan. Namun kepatuhan tersebut akan menghilang ketika kontrol terhadap kedisiplinan mereka menjauh dari pantauan. Dalam hal ini untuk mewujudkan tujuan dari kebijakan protokol kesehatan tidak cukup hanya sekadar dilihat dari kepatuhan terhadap kebijakan tersebut. Namun diperlukan pula kesadaran dari seluruh masyarakat akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan demi melindungi diri dan orang-orang di sekitar dari penyebaran Covid-19.

Kebijakan publik akan mencapai keberhasilan apabila mendapatkan dukungan dari masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. Efektivitas kebijakan publik dipengaruhi oleh relasi antara kepercayaan masyarakat dan kebijakan itu sendiri. Adanya kepercayaan dari masyarakat akan memberikan dukungan bagi kebijakan publik untuk mencapai keberhasilannya. Pada kasus kebijakan penggunaan masker ini, tampaknya memang belum didukung oleh kepercayaan masyarakat. Unsur ketidakpercayaan itu terbagi menjadi 2, yang pertama adalah ketidakpercayaan masyarakat bahwa Covid-19 itu nyata adanya. Versi lain dari pendapat ini adalah *Corona* bukanlah virus berbahaya yang perlu ditakuti. Yang kedua adalah ketidakpercayaan masyarakat akan kinerja pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 ini. Hal ini terbukti dari pandemi yang tak kunjung berakhir dan semakin hari kasus konfirmasi positif Covid semakin bertambah. Tidak kunjung berakhirnya pandemi Covid-19 ini dianggap oleh masyarakat menambah masalah bagi kehidupan mereka. Masalah tersebut misalnya permasalahan ekonomi atau keresahan dan kesulitan para orang tua dan wali murid yang seakan lelah mendampingi anak-anak usia sekolah mereka belajar daring dari rumah.

Terlepas dari kebijakan yang ditetapkan pemerintah terkait dengan protokol kesehatan termasuk penggunaan masker, di era pandemi Covid-19 sekarang ini, masyarakat hendaknya senantiasa meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya virus *Corona*. Virus *Corona* ini memang tidak terlihat namun bukan berarti tidak ada. Untuk itu diperlukan kesadaran masyarakat tidak hanya sekadar taat pada aturan protokol kesehatan namun juga memahami bahwa virus *Corona* ini nyata adanya dan berbahaya sehingga perlu dicegah penyebarannya. Pencegahan penularan Covid-19 merupakan tanggung bersama. Diperlukan sinergi antara pemerintah sebagai pemangku kebijakan dan masyarakat selaku sasaran kebijakan agar kebijakan yang telah dibuat berjalan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan. Dengan demikian diharapkan pandemi Covid-19 dapat segera berakhir.

PENUTUP

Pandemi global yang terjadi di seluruh dunia telah mengubah kehidupan manusia. Tuntutan untuk menyesuaikan keadaan di era pandemi Covid-19 ini terjadi di segala aspek kehidupan. Masyarakat harus menyesuaikan diri dengan kehidupan di tengah-tengah penyebaran virus *Corona*. Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam mengendalikan laju perkembangan penyebaran Covid-19. Berbagai kebijakan diambil agar pandemi Covid-19 tidak semakin meluas. Salah satu kebijakan yang diambil adalah peraturan tentang protokol kesehatan termasuk di dalamnya penggunaan masker ketika beraktivitas diluar rumah. Kebijakan penggunaan masker ini direspon bermacam-macam oleh masyarakat. Seperti lazimnya sebuah kebijakan, ada pro dan kontra dalam kebijakan ini. Masing-masing orang memiliki pendapat yang berbeda-beda dalam menyikapi kebijakan tersebut.

Dalam implementasi kebijakan penggunaan masker pada masyarakat kabupaten Jombang, hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi kepatuhan kelompok sasaran kebijakan, kebijakan ini dapat dikatakan berhasil apabila ada pengawasan yang ketat. Namun bila ditinjau dari tujuan kebijakan tersebut, agaknya masih jauh dari kata berhasil. Hal ini dapat dilihat dari masih terjadi penambahan kasus konfirmasi positif hari demi hari. Penelitian ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu diperlukan adanya kajian lebih mendalam terkait tema-tema serupa bagi peneliti selanjutnya. Penelitian-penelitian dengan tema serupa akan memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan khususnya dalam kajian kebijakan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, R. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cetakan 1, p. 15). Ar-Ruzz Media.
- Akib, H. (2010). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1 no1. <https://ojs.unm.ac.id/iap/article/view/289/6>

- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik* (cet-1). CV. Pustaka Setia.
- Dinkes.jombangkab.go.id. (2021). *Dinkes Jombang | Data Covid-19 Kabupaten Jombang*.
<https://dinkes.jombangkab.go.id/data-Covid-19-kabupaten-jombang>
- Dye, T. R. (2017). Understanding Public Policy. In *Understanding Public Policy*.
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik*. CV. Widya Karya.
- Ipelona, E. (2021). *Gerakan 6 M, Senjata Ampuh Lawan Penyebaran Covid-19*.
<https://www.kompas.tv/article/187867/gerakan-6-m-senjata-ampuh-lawan-penyebaran-Covid-19>
- Lystianingrum, N., & Philona, R. (2021). *Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Masa Pandemi*. 15(7), 4727–4740.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33758/mbi.v15i7.943>
- Meilisa, H. (2020, September 17). *Razia Masker Sasar Pasar, Pakar Ingatkan Kebijakan Ini Tak Boleh Pandang Bulu - Halaman 2*. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5176452/razia-masker-sasar-pasar-pakar-ingatkan-kebijakan-ini-tak-boleh-pandang-bulu/2>
- Miles, H. (2009). *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode - Metode Baru*. UI Press.
- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Rosdakarya.
- Nasional, T. K. P. G. T. (n.d.). *Gunakan Masker dengan Tepat Cegah Penularan COVID-19 - Berita Terkini | Covid19.go.id*. Retrieved May 16, 2021, from
<https://covid19.go.id/p/berita/gunakan-masker-dengan-tepat-cegah-penularan-Covid-19>
- Radarjombang.jawapos.com. (2021). *JOMBANG – Persebaran Covid-19 di Kabupaten Jombang mencatatkan rekor*.
<https://radarjombang.jawapos.com/read/2021/02/11/240762/kabupaten-jombang-catatkan-rekor>
- Subianto, A. (2020). Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi. In *Brilliant* (Vol. 53, Issue 9).
- Wahyuni, E., & Hertati, D. (2021). Implementasi Kebijakan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 Di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang. *Journal Publicuho*, 4(2), 457.
<https://doi.org/10.35817/jpu.v4i2.18077>
- Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.45/348 /415.10.1.3/ 2020 Tentang Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Jombang*. (2020).
- Peraturan Bupati Jombang no. 57 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan*

Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. (n.d.).